



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 10 TAHUN 1962  
TENTANG  
PENCABUTAN UNDANG-UNDANG KRISIS IMPOR 1933

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ekonomi Terpimpin dan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi, perlu segera diambil tindakan-tindakan penertiban mengenai peraturan-peraturan yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini;  
2. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada sub 1, dianggap perlu meninjau kembali Undang-undang Krisis Impor 1933;  
3. bahwa karena keadaan memaksa, hal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

Mengingat : 1. Pasal 22 dan pasal 33 Undang-undang Dasar;  
2. Ketetapan M.P.R.S. No. I dan II/MPRS/1960;  
3. Instruksi Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. 2/Ko. T.O.E. tertanggal 18 Mei 1962;  
4. Undang-undang Krisis Import 1933.

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pencabutan Undang-undang Krisis Impor 1933.

Pasal 1. ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1.

Mencabut Undang-undang Krisis Impor 1933 (Lembaran-Negara tahun 1933 No. 349) serta semua peraturan pelaksanaannya

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Agustus 1962,  
Presiden Republik Indonesia,  
ttd  
SUKARNO,

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Agustus 1962.  
Sekretaris Negara,  
ttd  
MOCHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 44



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

No.10 TAHUN 1962

tentang

PENCABUTAN UNDANG-UNDANG KRISIS IMPOR 1933.

UMUM.

Undang-undang ini diadakan oleh Pemerintah Hindia Belanda guna membendung arus barang dari Luar Negeri dengan jalan pembatasan barang-barang impor, terutama ditujukan terhadap sistim dumping yang diadakan oleh Jepang, dalam rangka melindungi industri di Negeri Belanda. Karena pada waktu ini Undang-undang Krisis Impor tersebut juga tidak dipergunakan dalam pembatasan barang-barang impor dan kebijaksanaan dalam impor didasarkan antara lain atas persetujuan dagang antar Negara, maka Undang-undang itu perlu dicabut.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 dan 2.

Cukup jelas.

Diketahui

Sekretaris Negara

ttd

MOHD. ICHSAN.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 2471